

**Sekilas:**

# Program SKALA di Aceh

## Oktober 2024

### Pengantar

Provinsi Aceh dibentuk pada akhir tahun 1949, dan kemudian diresmikan kembali melalui Undang-Undang No 24 Tahun 1956, yang mencakup seluruh wilayah eks Keresidenan Aceh. Sejak tahun 1959, Aceh telah memiliki status sebagai daerah istimewa dengan otonomi dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mulai berlaku setelah tercapainya perjanjian damai, yang mengatur pemberian dana otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dari tahun 2008 hingga 2027. Secara administratif, Provinsi Aceh terdiri dari 23 kabupaten dan kota, dengan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi.

Provinsi Aceh, dikenal dengan kekayaan budaya dan nilai historisnya, menerapkan hukum lokal yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, menjadikannya berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Provinsi ini juga memiliki keanekaragaman alam yang melimpah, mulai dari hutan hujan, pegunungan, hingga pantai,

yang mendukung pertumbuhan industri ekowisata dan menjadi habitat bagi spesies langka seperti harimau Sumatera dan orangutan. Perekonomian Aceh ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, serta industri minyak dan gas. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan penyediaan layanan dasar melalui berbagai inisiatif, namun tantangan besar masih ada dalam hal meningkatkan kualitas layanan dasar dan memastikan aksesibilitas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Program SKALA<sup>1</sup> bekerja sama dengan Pemerintah Aceh untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan serta dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Selain itu, SKALA juga mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja publik. Kantor Program SKALA di Provinsi Aceh resmi mulai beroperasi pada Januari 2023.

Gambar 1. Data Administratif



Jumlah Penduduk:  
**5.400.000 jiwa**  
(Badan Pusat Statistik, 2023)



Luas Wilayah:  
**56.839 km<sup>2</sup>**  
(Badan Pusat Statistik, 2023)



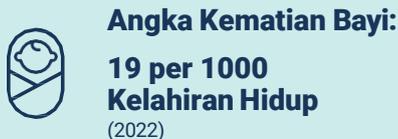
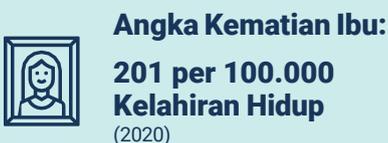
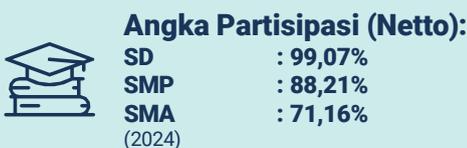
Pusat Pemerintahan  
dan Ibu Kota:  
**Banda Aceh**



Kapasitas Keuangan Daerah:  
**Rp11 triliun, dengan 50-70% dari  
transfer fiskal daerah**  
(BPKA, 2024)

1. Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

Gambar 2. Data Sosioekonomi Utama  
(Sumber: BPS kecuali disebutkan lain)



## Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Sejak tahun 2005, Provinsi Aceh telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Perjanjian damai yang tercapai membuka peluang untuk memusatkan perhatian pada upaya rekonstruksi serta pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor yang paling berkontribusi adalah pertambangan, terutama dalam ekstraksi minyak dan gas, yang menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.

Namun, ketergantungan yang tinggi pada sektor berbasis sumber daya alam juga membawa risiko bagi keberlanjutan ekonomi. Pemerintah Aceh berupaya mendiversifikasi ekonomi dengan mendorong investasi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja dengan keterampilan rendah hingga menengah.

Peningkatan infrastruktur menjadi prioritas utama Pemerintah Aceh melalui investasi dalam berbagai program yang memperkuat jaringan transportasi, pasokan listrik, dan konektivitas digital. Pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk mendorong pembangunan sosial, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, diharapkan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari penyediaan layanan dasar yang lebih baik dan mencapai standar pelayanan minimal (SPM).



### Dukungan Program SKALA: Penyediaan Layanan Dasar yang Inklusif di Provinsi Aceh

Program SKALA mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab utama mereka dalam penyediaan layanan dasar. Di Aceh, pemerintah provinsi berperan penting dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Program SKALA. Pembentukan Komite Program Provinsi (*Provincial Program Committee-PPC*) melalui surat Keputusan Gubernur bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola pelaksanaan Program SKALA. Program SKALA menyelaraskan Rencana Kerja Tahunannya dengan dokumen perencanaan dan inisiatif

daerah guna mendorong pemahaman bersama serta kolaborasi di antara mitra pemerintah pengampu kegiatan. Sinergi ini memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.



## **Mempromosikan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)**

Pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan GEDSI melalui berbagai inisiatif yang bertujuan memperkuat hak-hak serta penyediaan layanan dasar bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Langkah-langkah yang diambil mencakup penyusunan regulasi daerah (Qanun) dan rencana aksi, termasuk Rencana Aksi Daerah 2024-2029 untuk Penyandang Disabilitas. Upaya ini bertujuan untuk mengintegrasikan inklusi disabilitas ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk memastikan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan kelompok disabilitas dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan penerima manfaat.

Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan layanan dasar agar lebih mudah diakses. Program SKALA turut mendukung inisiatif ini dengan memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas OPD yang terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut.



## **Menggunakan Data dan Analitik untuk Perencanaan dan Penyediaan Layanan Dasar yang Lebih Baik**

Untuk memperkuat penyediaan layanan dasar Pemerintah Aceh mendorong peningkatan tata kelola data dengan menerapkan kebijakan Satu Data. Untuk mengatasi tantangan sistem data yang terfragmentasi, pemerintah daerah telah mengembangkan platform seperti Sistem Informasi Gampong Aceh (SIGAP) dan Portal *Open Data* Aceh. Kedua platform ini berfungsi untuk menyederhanakan pengumpulan dan pengelolaan data di 23 kabupaten/kota serta 6.500 gampong atau desa di Provinsi Aceh. Dengan demikian, proses pengambilan

keputusan dalam perencanaan, penanggulangan kemiskinan, dan penyediaan layanan dasar dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Dengan dukungan Program SKALA, pemerintah daerah juga telah mendirikan Klinik Konsultasi Data yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan pengembangan sistem, serta memperkuat kolaborasi antar OPD agar penggunaan data menjadi lebih efektif. Selain itu, data registrasi sosial ekonomi (REGSOSEK) dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan dalam pelaksanaan program-program yang didanai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Upaya ini bertujuan untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih tepat sasaran.



## **Meningkatkan Kapasitas Fiskal**

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pengelolaan fiskal dengan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan penyediaan layanan dasar. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pengesahan Qanun No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui perbaikan mekanisme pemungutan pajak, identifikasi sumber pendapatan baru, serta pemutakhiran data tanah dan properti guna mendukung perpajakan yang lebih akurat.

Dengan dukungan analisis dari Program SKALA, Pemerintah Aceh saat ini sedang menyelesaikan Peraturan Gubernur untuk pelaksanaan Qanun tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengumpulan pendapatan dan menemukan area yang berpotensi untuk perbaikan. Selain itu, Pemerintah Aceh juga sedang melakukan evaluasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (DOK) dari tahun 2008 hingga 2022. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pencapaian pembangunan serta mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi penurunan DOK yang terjadi dari tahun 2023 hingga 2027. Semua upaya ini diambil untuk memperkuat kebijakan perpajakan dan meningkatkan manajemen pendapatan, demi memastikan kelanjutan penyediaan layanan dasar dan stabilitas ekonomi jangka panjang.



## Peningkatan Kualitas Belanja: Perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam upaya mencapai SPM untuk penyediaan layanan dasar, pemerintah daerah telah mengintegrasikan data SPM ke dalam Portal *Open Data* Aceh. Langkah ini memungkinkan perencanaan dan koordinasi yang lebih baik di berbagai sektor. Salah satu inisiatif utama adalah klinik konsultasi SPM, yang berhasil meningkatkan pencapaian SPM dari 57,59% pada tahun 2022 menjadi 93,26% pada tahun 2023. Selain itu, pemerintah daerah memberikan dukungan teknis kepada Tim Pelaksana SPM di Tingkat provinsi dan kabupaten untuk menetapkan target, memantau kemajuan, serta mengevaluasi penyediaan layanan

dasar di enam sektor utama. Pemerintah daerah juga telah berupaya mengidentifikasi potensi anggaran dan sumber dana untuk mendukung pemenuhan SPM, sehingga memungkinkan OPD untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal. Program SKALA turut mendukung upaya ini dengan memberikan dukungan teknis dalam pengumpulan dan penjaminan kualitas data, fasilitasi penggunaan portal data, serta peningkatan kapasitas bagi Tim Pelaksana SPM di tingkat provinsi dalam hal perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah.

### Rencana Kerja Program SKALA Tahun 2024-2025

TEMA	AREA FOKUS
<b>Penguatan Partisipasi, Representasi, dan Pengaruh yang Lebih Kuat dari Kelompok Rentan (GEDSI)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan terhadap penguatan partisipasi, representasi, dan pengaruh yang lebih kuat dari <b>perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya</b> dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai penyediaan layanan dasar di daerah</li></ul>
<b>Penguatan Penyediaan dan Pemanfaatan Data (D&amp;A)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan penguatan kebijakan dan kelembagaan Satu Data Aceh, termasuk dalam pengelolaan SPM</li><li>• Dukungan penguatan sistem informasi desa, seperti SIGAP</li><li>• Dukungan penguatan sistem dan integrasi antar sistem pengelolaan data</li></ul>
<b>Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (PFM)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan penguatan optimalisasi transfer fiskal dan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas belanja publik</li><li>• Dukungan penguatan pengelolaan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi</li></ul>
<b>Peningkatan Kualitas Belanja Daerah (SPM)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan penguatan manajemen perencanaan untuk mencapai sinergi antara rencana pusat dan daerah, termasuk daerah otonomi khusus</li><li>• Dukungan penguatan implementasi penerapan SPM</li><li>• Dukungan penguatan perencanaan dan penganggaran untuk memastikan penyediaan layanan dasar yang inklusif</li></ul>
<b>Tata Kelola Program (PPC)</b>	Dukungan tata kelola program SKALA di Provinsi Aceh